SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1991 TAHUN 2026
Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE OKTOBER 2026
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing skripsi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE OKTOBER 2026 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pertama : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa periode Oktober 2026 program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana terlampir untuk membimbing skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangsebagaimana terlampir.

Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.

Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada program studi.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Oktober 2026

Dr. Umi Sumbulah

Tembusan Kepada Yth:
1. Para Ketua Program Studi;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 1991 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Oktober 2026
Tentang : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode Oktober 2026 Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NIM	NAMA	JUDUL YANG DIAJUKAN	DOSEN PEMBIMBING
1	230203110083	Bahrul Ulum Alfauzi Ainul Yaqin	BATAS KEWENANGAN PERUM JASA TIRTA I DALAM MEMBATASI AKSES MASYARAKAT PADA PUNCAK BENDUNGAN LAHOR SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
2	230203110072	KEVIN CAHAYA RAHARDJA	KONSTITUSIONALITAS PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF DIJABATAN SIPIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSLAH	Imam Sukadi, S.H., M.H
3	230203110025	FAWWAZFUDHAIL MUCHAMMAD	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)	Abdul Kadir, S.HI., M.H
4	230203110024	NUR RAHMAWATI WAHID	POLITIK HUKUM KESAKSIAN JARAK JAUH TANPA KONFRONTASI FISIK PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW DAN SIYASAH DUSTURIYAH	Imam Sukadi. S.H., M.H
5	230203110122	VISCA AZIZA	PROBLEMATIKA PENYELESAIAN DUGAAN KETIDAKPEMENUHANNYA SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PASCA PELANTIKAN	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
6	230203110100	ANNISA RIFATUL ULYA	PEMUTUSAN AKSES AFFILIATE DAN KONTEN KREATOR DALAM REGULASI NOMOR INDUK BERUSAHA OLEH MENKOMINFO MENURUT UU ITE PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH	Dr. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
7	230203110117	NANDA SANIA AL MUBAROK	DELEGASI KEWENANGAN MENTERI DALAM PENETAPAN PROFIL RISIKO PLF BERDASARKAN PERMEN KOMDIGI NOMOR 9 TAHUN 2026 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)	Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
8	230203110123	FINA MAWADAH INGGIL WIJAYA	BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR: ANALISIS PUTUSAN 273/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENGATURAN SISA KOUTA TELEKOMUNAKASI DLAM PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYYAH	Dr . Prayudi Rahmatullah, M.HI.
9	230203110008	SHALYA HAGGIE NARAH SUKI	KONSERVASI HUTAN MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999	Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.

			DALAM PRINSIP HIFZ AL-BI'AH UNTUK MENCEGAH ALIH (Studi di Taman Nasional Tesso Nilo)	
10	230203110055	MUHAMMAD YASIN YUSUF	ETIKA DISKRESI PRESIDEN SEBAGAI COMFORTER-IN-CHIEF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
11	230203110011	RIZKI MUSTIKA TRIJAYANTI	KEDUDUKAN HUKUM PENJELASAN UU APBN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Dr. Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
12	230203110132	ANI SAFITRI	PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN LINTAS YURIDIKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pada Kebakaran Kawasan Hutan Lindung Di Desa Pandesari, Kabupaten Malang)	Dr. Musleh Harry, s.H., M.Hum
13	200203110022	AHMAD SYAHRIR	DUGAAN PENYALAGUNAAN DAN INTIMIDASI BIROKRASI OLEH KEPALA DAERAH: TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS SKANDAL "SURAT SAKTI" DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	Abdul Kadir, S.HI., M.H.
14	230203110081	RAISYA JASMINE AZZAHRA	HARMONISASI ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGATURAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 160/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
15	230203110034	NASYWA KAMILA PUTRI	IMPLIKASI HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DARI DISKRIMINASI PADA FENOMENA BOTI HUNTER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI YAYASAN PEREMPUAN MAHARDIKA JAKARTA TIMUR)	Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
16	230203110001	LIZA ELYVIA NUR SYAYYIDAH	PERGESERAN KONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMUTUSAN AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-	Nur Jannani, S.HI., M.H.

			XVIII/2020 DAN NOMOR 311/PUU-XXIV/2026)	
17	230203110127	NORUL ROHMAH	PENGAWASAN ADMINISTRATIF TERHADAP PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN SKB 7 MENTERI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH	Nur Jannani, S.HI., M.H.
18	230203110049	NURUL AZMI NAFILAH	UPAYA REPATRIASI TERSANGKA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH (Analisis Kasus Red Notice Ahmad Al-Misry)	Teguh Setyobudi, S.H., M.H.
19	230203110107	FIRMALA KHISBILLA TAMALIA	BATAS KEWENANGAN MKMK DALAM MENAFSIRKAN YURISDIKSINYA SENDIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
20	230203110064	DINDA RIESKA AYUNINGTYAS	PENGATURAN WEWENANG EKSEKUTORIAL BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) TERHADAP JAMINAN HAK ATAS RASA AMAN WARGA NEGARA: PASCA PUTUSAN MK NO 180/PUU-XXIII/2025 (Studi Perbandingan Dengan United States Coast Guard)	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.
21	230203110075	DIYU SIFA VALDA MAHARANI	URGENSI DAN IMPLIKASI SHADOW CABINET MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES PASCA-MATINYA OPOSISI PARLEMEN: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN TURKI	1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. 2. Dr. Abul Ma'ali, M.Ed
22	230203110009	LUQMAN HAKIM HABIBULLOH	BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN PASAL 280 KUHP PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Oktober 2026

Ilmi Sambulah